

**IMPLEMENTASI PERMENDIKDASMEN NOMOR 6 TAHUN
2026 TENTANG BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN
MELALUI PENGUATAN PERAN GURU WALI DI SMK
NEGERI BABIRIK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH

HAPSAH

NPM : 2022183

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

AMUNTAI

2026

TANDA PERSETUJUAN

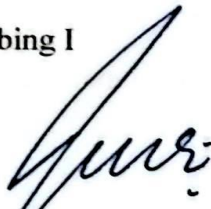
Menerangkan Mahasiswa dibawah ini atas nama :

Nama : HAPSAH
NPM : 2022183
Program Studi : Administrasi Publik
Judul skripsi : **IMPLEMENTASI PERMENDIKDASMEN NOMOR
6 TAHUN 2026 TENTANG BUDAYA SEKOLAH
AMAN DAN NYAMAN MELALUI PENGUATAN
PERAN GURU WALI DI SMK NEGERI BABIRIK
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan sepenuhnya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama diatas untuk dilanjutkan ke pembimbing Skripsi pada program studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Amuntai, April 2026

Pembimbing I



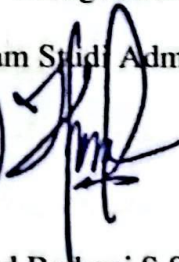
Gusti Muhammad Hidayatullah, S.Sos, M.AP
NUPTK. 2742773674130272

Pembimbing II



Drs. H. Hasbi Salim, M.Pd
NUPTK. 4058741644200003

Mengetahui :



Ahmad Balhaqi, S.Sos.M.A.
NIK 1992104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil alamin, tidak ada kata yang pantas penulis ucapkan selain puji dan syukur bagi Allah Subhanahu Wata'ala pencipta alam semesta penulis panjatkan kehadiran-Nya, semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan, beserta keluarga. Proposal skripsi yang berjudul “Implementasi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Penguatan Peran Guru Wali Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Siswa Di SMK Negeri Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara” di ajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana S1 pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Pada kesempatan ini tak lupa juga penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos., M.AP. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai yang telah banyak membantu memberikan pengarahan dan petunjuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan dengan baik.
2. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah banyak membina kelancaran proses studi.
3. Bapak Gusti Muhammad Hidayatullah, S.Sos, M.AP. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu memberikan pengarahan dan petunjuk Kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan dengan baik.
4. Bapak Drs. H. Hasbi Salim, M.Pd. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu memberikan pengarahan dan petunjuk Kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan dengan baik.

5. Seluruh Dosen beserta staf tata usaha beserta jajarannya yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
6. Seluruh Dewan Guru beserta staf tata usaha beserta jajarannya yang ada di SMK Negeri Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Seluruh staf tata usaha beserta jajarannya yang ada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
8. Kedua orang tua tercinta Ayah (Sarkani), Ibu (Mursidah) yang telah memberikan segala kasih sayang kepada penulis, berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus terhadap penulis, sehingga termotivasi dan menyelesaikan pembuatan skripsi ini.
9. Seluruh responden yang membantu dalam memberikan informasinya pada penulis.

Penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan. Kritik dan saran serta tanggapan yang bersifat membangun akan penulis terima demi kesempurnaan proposal skripsi ini.

Amuntai, Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Hasil Penelitian Terdahulu.....	8
B. Tinjauan Teoritis	9
1. Kebijakan Publik.....	11
2. Implementasi	17
3. Penguatan Peran Guru Wali	29
4. Pencegahan kekerasan.....	31
C. Kerangka Pemikiran.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Lokasi Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Tipe Penelitian	36
D. Data dan Sumber Data	37
E. Desain Operasional Penelitian	39

F. Teknik Pengumpulan Data.....	41
G. Teknik Analisis Data.....	42
H. Uji Kredibilitas Data	43
DAFTAR PUSTAKA	48

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	39
Tabel 3. 2 Desain Operasional Penelitian	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	35
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal, baik dalam aspek intelektual, moral, sosial, maupun emosional. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter, penanaman nilai-nilai kemanusiaan, serta penguatan sikap saling menghargai antar individu. Oleh karena itu, sekolah seharusnya menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh peserta didik untuk belajar dan berkembang tanpa rasa takut ataupun tekanan. Dalam kenyataannya, dunia pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah munculnya kasus kekerasan terhadap peserta didik dilingkungan sekolah. Kekerasan tersebut dapat berbentuk fisik, verbal, psikologis, maupun sosial seperti perundungan (bullying), pengucilan, intimidasi, serta perlakuan tidak adil antar peserta didik. Fenomena ini sering terjadi secara tersembunyi dan tidak selalu terpantau secara langsung oleh pihak sekolah. Dampaknya tidak hanya mengganggu proses pembelajaran, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan diri, memicu stres, menimbulkan trauma, serta menghambat perkembangan karakter peserta didik. Permasalahan kekerasan di sekolah menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari pencapaian akademik semata, tetapi juga dari terciptanya lingkungan belajar yang ramah anak dan

menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sekolah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan perlindungan, pendampingan, serta pembinaan yang berkelanjutan. Upaya pencegahan kekerasan harus dilakukan secara sistematis melalui keterlibatan seluruh unsur pendidikan, termasuk kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta orang tua. Sebagai bentuk komitmen dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan berkarakter, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri pendidikan dasar dan menengah Nomor 6 tahun 2026 Tentang Penguatan Peran Guru Wali. Peraturan ini menegaskan bahwa guru wali memiliki peran strategis dalam mendampingi peserta didik, tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga dalam pembinaan karakter, pengawasan perkembangan perilaku, serta pencegahan berbagai bentuk kekerasan dilingkungan sekolah. Guru wali diposisikan sebagai figur yang paling dekat dengan peserta didik sehingga diharapkan mampu memahami kondisi, kebutuhan, dan permasalahan yang dihadapi siswa secara lebih mendalam. Secara ideal, guru wali berperan sebagai pembimbing, pengarah, dan pengawas yang membantu peserta didik dalam mengembangkan sikap disiplin, tanggung jawab, serta kemampuan bersosialisasi secara sehat. Kedekatan hubungan antara guru wali dan peserta didik memungkinkan terjalinnya komunikasi yang lebih terbuka sehingga potensi konflik dapat diidentifikasi sejak dini. Dengan demikian, guru wali memiliki fungsi preventif dalam mencegah terjadinya kekerasan melalui pendekatan edukatif, persuasif, dan humanis. Namun demikian, implementasi suatu kebijakan tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah dirumuskan. Dalam praktiknya,

peran guru wali masih sering dipahami sebatas pengelolaan administrasi kelas, seperti pencatatan kehadiran, pengisian laporan, dan pengurusan data akademik siswa. Fungsi pembinaan karakter dan pendampingan sosial emosional belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Sekolah menengah kejuruan memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari satuan pendidikan lainnya. Proses pembelajaran di SMK lebih banyak menekankan pada kegiatan praktik, kerja sama tim, serta interaksi sosial yang intensif. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan dinamika hubungan antar peserta didik yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat memicu konflik ataupun perilaku kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif guru wali dalam menciptakan iklim kelas yang harmonis, disiplin, dan saling menghargai. SMK Negeri Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai salah satu lembaga pendidikan kejuruan memiliki tanggung jawab dalam membentuk lulusan yang tidak hanya kompeten secara keterampilan, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Keberagaman latar belakang peserta didik menuntut adanya pendampingan yang lebih intensif agar setiap siswa mampu beradaptasi dan berkembang secara positif di lingkungan sekolah. Dalam konteks ini penguatan peran guru wali menjadi sangat penting sebagai upaya preventif dalam mencegah terjadinya kekerasan serta membangun hubungan yang sehat antara peserta didik dan warga sekolah.

Berdasarkan kondisi yang ada, pelaksanaan peran guru wali dalam pencegahan kekerasan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti

keterbatasan waktu karena beban tugas mengajar, belum adanya pola pendampingan yang terstruktur, serta perlunya peningkatan koordinasi antar unsur sekolah dalam menangani permasalahan peserta didik. Selain itu tidak semua peserta didik mampu secara terbuka menyampaikan permasalahan yang mereka alami, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih intensif dan berkelanjutan dari guru wali. Di sisi lain, berbagai upaya telah dilakukan oleh sekolah dalam membangun budaya disiplin dan pembinaan karakter peserta didik. Namun, efektivitas pelaksanaan kebijakan penguatan peran guru wali perlu dikaji lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana peran tersebut telah dijalankan sesuai dengan tujuan yang di harapkan. Pemahaman mengenai proses pelaksanaan, kendala yang dihadapi, serta strategi yang dilakukan menjadi penting sebagai dasar perbaikan dan pengembangan kebijakan ditingkat satuan pendidikan. Dengan demikian kajian mengenai Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Penguatan Peran Guru Wali dalam Pencegahan kekerasan terhadap Siswa di SMK Negeri Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut serta kontribusinya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan, sehingga tujuan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kualitas peserta didik dapat terwujud secara optimal. Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan diketahui bahwa ada beberapa permasalahan yang terjadi di SMK Negeri Babirik Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu :

1. Pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab Guru Wali masih belum merata, sehingga pelaksanaan perannya belum berjalan secara optimal diseluruh kelas. Seperti ditemukan pada beberapa kelas, Guru Wali belum sepenuhnya menjalankan tugasnya secara maksimal, misalnya kurang aktif dalam membimbing siswa, belum rutin melakukan pemantauan, atau belum memahami pembagian tugas dan tanggung jawab secara jelas. Contohnya, ada Guru Wali yang sudah secara aktif memberikan arahan, memantau perkembangan siswa, serta menjalin komunikasi yang baik, namun di sisi lain masih terdapat Guru Wali yang hanya menjalankan tugas secara terbatas dan belum konsisten dalam melakukan pendampingan. Hal ini terjadi karena setiap Guru Wali masih memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda serta masih menyesuaikan dengan kondisi masing-masing kelas, sehingga pelaksanaan perannya belum seragam. Selain itu, sebagai bagian dari proses penyesuaian, tidak semua Guru Wali langsung mampu memahami dan menjalankan perannya secara menyeluruh. Akibatnya , pelaksanaan peran guru wali belum berjalan secara merata di seluruh kelas, sehingga pada beberapa kelas bimbingan sudah berjalan dengan baik, sementara pada kelas lain masih dalam tahap penyesuaian terhadap pembagian tugas dan tanggung jawab.
2. Pelaksanaan pendampingan siswa oleh Guru Wali belum berjalan secara optimal, sehingga pendampingan belum dapat dilakukan secara konsisten di setiap kelas. Seperti ditemukan pada kondisi di mana Guru Wali tetap berupaya melaksanakan pendampingan, namun kegiatan tersebut dilakukan di tengah berbagai tugas profesional lainnya, seperti mengajar, menyusun

perangkat pembelajaran, serta kegiatan sekolah lainnya. Misalnya, pada saat jadwal mengajar yang padat, Guru Wali tidak dapat melakukan pendampingan secara rutin, sehingga interaksi dengan siswa menjadi terbatas dan hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja. Namun, karena belum adanya pengelolaan waktu dan sistem pendampingan yang terstruktur, kegiatan pendampingan sering kali menyesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan waktu Guru Wali. Hal ini menyebabkan pendampingan tidak memiliki jadwal yang tetap dan belum berjalan secara maksimal. Akibatnya, proses pendampingan siswa menjadi kurang efektif dan tidak konsisten di setiap kelas, sehingga peran Guru Wali dalam membimbing dan mengarahkan siswa belum terlaksana secara optimal.

3. Pemantauan perkembangan perilaku siswa oleh Guru Wali belum berjalan secara optimal, sehingga deteksi dini terhadap potensi konflik belum dapat dilakukan secara maksimal. Seperti ditemukan kasus seperti siswa yang mulai menunjukkan perilaku menyimpang, seperti kurang disiplin, sering melanggar aturan, atau terlibat konflik dengan teman sebaya. Namun, karena kurangnya pemantauan yang intensif, gejala awal tersebut tidak segera teridentifikasi. Akibatnya, konflik yang seharusnya dapat dicegah sejak dini justru berkembang menjadi permasalahan yang lebih kompleks, seperti perundungan (bullying) atau perselisihan antar siswa.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERMENDIKDASMEN NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN MELALUI**

PENGUATAN PERAN GURU WALI DI SMK NEGERI BABIRIK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”.

B. Fokus Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, agar penelitian lebih terarah dan mengenai sasaran yang diharapkan, Fokus Penelitian di sini dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan dibahas.

Berdasarkan uraian yang penulis jabarkan pada latar belakang diatas maka fokus penelitian yang penulis ambil untuk diteliti sesuai teori implementasi kebijakan menurut Teori George C. Edwards III dalam buku Herabudin (2016:127), yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti ini adalah :

1. Bagaimana implementasi permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 tentang penguatan peran guru wali dalam pencegahan kekerasan terhadap siswa di SMK Negeri Babirik kabupaten hulu sungai utara ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 tentang penguatan peran guru wali dalam pencegahan kekerasan terhadap siswa di SMK Negeri Babirik kabupaten hulu sungai utara ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana implementasi permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 tentang penguatan peran guru wali dalam pencegahan kekerasan terhadap siswa di smk negeri babirik kabupaten hulu sungai utara.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 tentang penguatan peran guru wali dalam pencegahan kekerasan terhadap siswa di smk negeri babirik kabupaten hulu sungai utara.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik khususnya terkait di bidang implementasi kebijakan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada kepala sekolah, khususnya para guru dan wali kelas tentang pentingnya memahami implementasi permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 tentang penguatan peran guru wali dalam pencegahan kekerasan terhadap siswa di smk negeri babirik kabupaten hulu sungai utara.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dinda Novita dan Sandra pada tahun 2025 mengkaji **“Implementasi program Sekolah Aman Anti Kekerasan di SMAN 1 Suliki”**. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta peserta didik. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih ditemukannya kasus kekerasan di lingkungan pendidikan serta belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pencegahan kekerasan di sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah telah berupaya mengimplementasikan kebijakan nasional melalui pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) yang ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah. Pembentukan tim tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran warga sekolah terhadap pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, memberikan edukasi mengenai dampak kekerasan, serta menyediakan mekanisme pelaporan dan penanganan kasus. Tim ini melibatkan unsur pimpinan sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan pihak lain yang memiliki peran dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Namun demikian, penelitian tersebut juga menemukan bahwa implementasi program belum berjalan secara optimal karena masih terdapat keterbatasan dalam

pelaksanaan kebijakan di tingkat sekolah. Hambatan yang muncul menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi formal, tetapi juga sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, koordinasi antar unsur sekolah, serta pemahaman yang jelas mengenai peran masing-masing pelaksana kebijakan.

2. Upaya Sekolah Dalam Mencegah Bullying Di Sekolah Pada Program Sekolah Ramah Anak

SMP Negeri 28 Surabaya ialah salah satu sekolah terbaik di Surabaya. Hal ini didukung dengan adanya penghargaan yang dimilikinya, salah satunya yaitu penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA) Republik Indonesia (RI) karena telah memenuhi standar sebagai satuan pendidikan yang ramah anak di jenjang SMP pada tahun 2023. Dalam implementasi program Sekolah Ramah Anak, terdapat enam komponen yang harus dilaksanakan agar dapat meraih tujuan yang diharapkan yaitu, 1). Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Mencakup adanya komitmen secara tertulis serta penerapan kebijakan sekolah yang mendukung terpenuhinya hak-hak anak dan perlindungan terhadap mereka, termasuk upaya pencegahan terhadap kekerasan, diskriminasi, dan tindakan perundungan. 2). Pendidikan serta tenaga kependidikan yang terlatih. Pendidik serta tenaga kependidikan memiliki pemahaman, sikap, dan keterampilan dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, serta menghormati hak-hak anak 3). Proses Pembelajaran yang Ramah Anak. Pembelajaran

dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, menyenangkan, bebas kekerasan, serta memperhatikan perbedaan kemampuan dan latar belakang siswa. 4). Sarana serta Prasarana yang Ramah Anak. Fasilitas sekolah dirancang untuk memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, kesehatan, serta aksesibilitas bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. 5). Partisipasi Anak. Anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya, dan turut berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aktivitas di lingkungan sekolah. 6). Partisipasi Orang Tua, Masyarakat, dan Dunia Usaha

Dukungan dan keterlibatan orang tua, masyarakat sekitar, dan dunia usaha sangat penting dalam mendukung pelaksanaan SRA melalui berbagai bentuk kolaborasi.

Dalam pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak, sekolah ini telah menyusun beragam strategi pencegahan guna menghindari terjadinya tindakan perundungan di lingkungan pendidikan.. Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah kegiatan disiplin positif yang terintegrasi dalam aktivitas harian peserta didik, seperti pembiasaan 5S (senyum, sapa, salam, sopan, santun), pembacaan doa sebelum kegiatan pembelajaran, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, juga pembacaan teks Pancasila. Praktik-praktik ini tidak hanya bertujuan membentuk karakter peserta didik, tetapi juga menciptakan budaya sekolah yang inklusif serta penuh penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, sekolah menyelenggarakan kegiatan keagamaan dan yel-yel Sekolah Ramah

Anak sebagai bentuk internalisasi nilai moral serta penguatan identitas kolektif. Partisipasi aktif siswa juga diperkuat melalui program Pematik (Pendamping Siswa Terbaik), yakni forum kepemimpinan siswa yang bertugas memberikan teladan positif serta menjadi agen pencegahan bullying di kalangan teman sebaya. Di samping itu, pihak sekolah menjalin kolaborasi dengan berbagai institusi eksternal seperti puskesmas, BABINSA, kelurahan, dan kecamatan untuk memperkuat sistem perlindungan anak dan menciptakan ekosistem sekolah yang aman, sehat, dan ramah bagi seluruh warga sekolah.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata *policy* memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum (Said Zainal Abidin, 2016:3). Jadi kebijakan adalah keputusan yang berasal dari pemerintah untuk menyelesaikan kepentingan umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep untuk menyelesaikan beberapa permasalahan.

Menurut Aminuddin Bakry dalam (Hayat, 2018:17), mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang secara langsung mengatur

pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia untuk kepentingan masyarakat, publik, maupun warga negara.

Menurut Fredrich dalam Agustino, (2017:166) “kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kesempatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”.

Anderson dalam (Irawaty Igrisa, 2022:32) mengemukakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Ia juga kebijakan/*policy* menjadi dua, yakni substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan.

Sementara itu, Menurut David Easton kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Definisi kebijakan publik menurut Easton ini dapat diklasifikasikan sebagai suatu proses *management*, yang

merupakan fase dari serangkaian kerja pejabat publik. Dalam hal ini hanya pemerintah yang mempunyai andil untuk melakukan tindakan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah publik, sehingga definisi ini juga dapat diklasifikasikan dalam bentuk intervensi pemerintah (Ida Syafriyani, 2023:3).

b. Tahap-tahap Kebijakan

Menurut William Dunn N Dunn dalam (Siti Marwiyah, 2022:14-16) tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut.

1) Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas dalam mengatur kebijakan publik. Dalam proses inilah ada didalam ruang untuk melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan publik, biasanya muncul karena telah terjadi saling berpendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang sudah selesai atau akan ditempuh mengenai karakter permasalahan tersebut. Dalam *agenda setting* juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*). *Policy Issues* biasanya muncul karena telah

terjadi silang pendapat diantara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut.

2) Formulasi Kebijakan (*Policy Formulating*)

Formulasi kebijakan merupakan masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan, setelah itu masalah didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat di pilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk memecahkan masalah.

3) Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi ialah memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat di atur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sudah direncanakan harus didukung. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi symbol itu namun dimana melalui proses bagi warga negara belajar untuk mendukung pemerintah.

4) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

5) Evaluasi Kebijakan/Penilaian

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang

menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan

dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

c. Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan

Faktor menurut Suharno dalam Siti Marwiyah (2022:49-51) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan

dengan resiko yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*). Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

1) Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.

2) Adanya pengaruh kebiasaan lama

Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah *sunk cost*, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum profesional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut di kritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut di pandang memuaskan.

3) Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Berbagai keputusan/kebijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-

sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.

4) Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan social dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar. seperti masalah pertikaian kerja, pihak-pihak yang bertikai kurang respek pada upaya penyelesaian oleh orang dalam, tetapi keputusan yang diambil oleh pihak-pihak yang dianggap dari luar dapat memuaskan.

5) Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan atau keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan

2. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Secara etimologis, konsep Implementasi menurut kamus Webster berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Implement*. Dalam kamus, Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu dan memiliki efek yang sebenarnya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Definisi lain dari implementasi adalah menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek atau pengaruh pada sesuatu.

Menurut Nurdin Usman implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai suatu kegiatan.

Menurut Zainal Abidin (2019) Proses implementasi berkaitan dengan dua faktor utama, faktor utama internal dan faktor eksternal. Faktor utama internal merupakan kebijakan yang diimplementasikan, sedangkan faktor utama eksternal adalah kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait. Kondisi kebijakan adalah faktor yang paling dominan dalam proses implementasi karena yang diimplementasikan adalah kebijakan itu sendiri. Pada tingkat pertama, berhasil tidaknya implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh kualitas dan ketetapan strategi implementasi.

b. Model-model Implementasi Kebijakan

1) Teori Donald Van Metter Dan Carl Van Horn

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam (Leo Agustino, 2016:133-136) ada enam variabel yang mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan, yakni:

a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu

utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b) Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah: sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Karena, mau tidak mau, ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu. Saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan

baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakterhasilan implementasi kebijakan.

c) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindakan manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat-dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

d) Sikap/Kecendrungan (*Disposition*) para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan "dari atas" (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

e) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.

f) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan

kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

2) Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S Grindle, dipengaruhi oleh dua variabel yakni : (Irawaty Igrisa, 2022:69-70)

- a) Isi Kebijakan, yang mencakup kepentingan kelompok sasaran dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran, perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, ketepatan letak sebuah program, sebuah kebijakan menyebutkan aparat, pelaksanaanya dengan rinci, dan sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.
- b) Lingkungan kebijakan, yang mencakup kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa, tingkat kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran.

3) Daniel Mazmania dan Paul A. Sabatier

Model ini disebut kerangka analisis implementasi, Mazmania dan Sabatier (Sahya Anggara, 2018:268-269) berpendapat bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijaksanaan negara adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang memengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, antara lain sebagai berikut.

- a) Mudah-tidaknya masalah yang akan dikendalikan, yang mencakup kesukaran teknis, keragaman perilaku kelompok sasaran, persentase kelompok sasaran dibandingkan dengan jumlah penduduk, dan ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan.
- b) Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya, yang mencakup kejelasan dan konsistensi tujuan, digunakan teori kausal yang memadai, ketepatan alokasi sumber dana, aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana, rekrutmen pejabat pelaksana, dan akses formal pihak luar.
- c) Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut, yang mencakup kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan

sumber-sumber yang dimiliki kelompok, dukungan dari pejabat atasan, komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana.

4) Teori Brian W. Hogwood dan Lewis A Gun

Hogwood and Gun adalah seorang penulis Inggris yang sangat membela pandangannya tentang pentingnya pendekatan top-down untuk proses implementasi. Bagi mereka, pendekatan bottom-up yang cenderung menangani masalah implementasi berdasarkan kasus per kasus tidak menarik karena pembuat kebijakan adalah individu yang dipilih secara demokratis dan pandangan mereka tentang implementasi tidak melanggar demokrasi.

Ide dasar mereka berasal dari publikasi Gun yang menyelidiki penyebab kegagalan implementasi. Publikasi ini sedang dikembangkan dengan karyanya yang berjudul *"Policy Analysis for the Real World"* Di dalam tulisan tersebut memberikan proporsi untuk mencapai implementasi yang sempurna bagi para pembuat kebijakan dalam (Dian Suluh Kusuma Dewi, 2022:134-135) antara lain sebagai berikut:

- a) Situasi di luar lembaga atau organisasi pelaksana tidak secara serius menghambat proses implementasi.
- b) Waktu dan sumber daya yang cukup tersedia untuk mengimplementasikan program.

- c) Tidak ada batasan dalam penyediaan semua sumber daya yang Anda butuhkan, termasuk sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap tahapan dalam proses implementasi.
- d) Kebijakan yang diterapkan didasarkan pada teori kausal atau sebab akibat yang valid.
- e) Hubungan sebab akibat bersifat langsung dan sesedikit mungkin ada hubungan antara atau intervening variabel.
- f) Diimplementasikan oleh satu lembaga yang terlibat hubungan kelembagaan ketergantungan sangat rendah.
- g) Adanya pemahaman yang utuh dan konsistensi antara tujuan yang ingin dicapai dan kondisi ini harus ada sepanjang proses implementasi.
- h) Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, untuk mensignifikasikan tugas yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang turut terlibat dalam urutan langkah-langkah pelaksanaan secara lengkap, detail dan sempurna.

5) Teori Menurut Charles O. Jones

Menurut Jones dalam buku Leo Agustino (2016:154-155) dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara seksama, yakni:

a) Organisasi

Pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.

b) Interpretasi

Menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.

c) Penerapan

Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Secara lebih rinci mengenai organisasi, interpretasi, dan penerapan, penulis memaknainya sebagai berikut. Pertama, aktivitas pengorganisasian (*organization*) merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan). Kedua, aktivitas interpretasi (*interpretation*) merupakan aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Terakhir, ketiga, aktivitas aplikasi merupakan

aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Bertumpu pada apa yang dikemukakan Jones di atas, maka masalah implementasi kebijakan publik atau implementasi program semakin lebih jelas dan luas. Di mana implementasi merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi.

6) Teori Georgi C. Edward III

Dalam pandangan George C. Edward III implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel (Herabudin, 2016:127-131), yaitu:

a) Komunikasi

Untuk mencapai keberhasilan, implemetasi kebijakan pemerintah mensyaratkan agar implementor mengetahui hal yang harus dilakukan secara jelas. Tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman, atau tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui oleh kelompok sasaran, kemungkinan terjadi penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran sangat besar.

b) Sumber Daya

Implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya, baik sumber daya manusia, materi maupun metode. Sasaran, tujuan, dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, apabila implementor kekurangan sumber daya untuk pelaksanaan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumber daya, kebijakan tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat..

c) Disposisi

Watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, ia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

d) Struktur Birokrasi

Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan penting. Salah satu aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures/SOP*), yaitu pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yaitu birokrasi yang rumit dan

kompleks, serta ini menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

3. Penguatan Peran Guru Wali

Penguatan dalam konteks implementasi kebijakan pendidikan pada dasarnya merupakan proses peningkatan kapasitas (*capacity building*) yang bertujuan agar pelaksana kebijakan mampu menjalankan perannya secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, penguatan peran guru wali dimaknai sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kemampuan, kesiapan, dan efektivitas guru wali dalam menjalankan fungsi pembinaan serta pencegahan kekerasan terhadap siswa di lingkungan sekolah.

Penguatan tidak sekadar berarti memberikan tambahan tugas kepada guru wali, melainkan memastikan bahwa guru wali memiliki bekal yang cukup untuk melaksanakan peran tersebut secara profesional. Bekal tersebut meliputi pemahaman yang jelas mengenai tanggung jawabnya, keterampilan dalam mendampingi siswa, serta dukungan lingkungan kerja yang memungkinkan tugas tersebut dapat dijalankan secara nyata. Tanpa adanya penguatan, peran guru wali cenderung hanya bersifat administratif, seperti mengelola data siswa atau mengawasi kehadiran, sehingga fungsi pembinaan dan perlindungan siswa tidak terlaksana secara maksimal.

Melalui penguatan, guru wali diarahkan untuk menjadi figur pendamping yang mampu memahami kondisi psikologis, sosial, dan perilaku siswa. Guru wali tidak hanya berinteraksi dalam konteks pembelajaran, tetapi

juga berperan dalam membangun komunikasi yang terbuka, menciptakan rasa aman, serta mendeteksi secara dini potensi terjadinya konflik atau tindakan kekerasan. Dengan demikian, penguatan menjadikan guru wali sebagai pihak yang aktif melakukan langkah-langkah preventif, bukan sekadar menindak setelah terjadi pelanggaran.

Selain itu, penguatan juga berkaitan dengan peningkatan keterampilan interpersonal guru wali, seperti kemampuan berkomunikasi secara empatik, memberikan bimbingan, menyelesaikan permasalahan siswa secara persuasif, serta bekerja sama dengan pihak lain seperti guru bimbingan konseling dan manajemen sekolah. Keterampilan tersebut penting karena pencegahan kekerasan tidak dapat dilakukan hanya melalui aturan, tetapi membutuhkan pendekatan manusiawi yang mampu membangun kedekatan antara guru dan siswa.

Dengan adanya penguatan, peran guru wali mengalami pergeseran dari fungsi administratif menuju fungsi edukatif dan preventif. Guru wali menjadi lebih terlibat dalam membentuk lingkungan sekolah yang kondusif, mengawasi dinamika hubungan antar siswa, serta menanamkan nilai-nilai karakter seperti saling menghargai, disiplin, dan tanggung jawab. Peran yang diperkuat ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan sehingga potensi kekerasan dapat diminimalkan sejak awal.

Berdasarkan uraian tersebut, penguatan peran guru wali dalam penelitian ini dipahami sebagai proses peningkatan kemampuan dan optimalisasi fungsi guru wali agar mampu menjalankan tugas pembinaan,

pendampingan, dan pencegahan kekerasan terhadap siswa secara efektif, terarah, dan berkelanjutan dalam kehidupan sekolah sehari-hari.

4. Pencegahan kekerasan

Pencegahan kekerasan merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan untuk menghindari, mengurangi, dan mengendalikan kemungkinan terjadinya tindakan yang merugikan individu baik secara fisik, psikologis, maupun sosial sebelum tindakan tersebut benar-benar terjadi. Dalam konteks pendidikan, pencegahan kekerasan tidak hanya dipahami sebagai usaha menghentikan perilaku negatif, tetapi sebagai bagian integral dari proses pembinaan peserta didik agar mampu berkembang dalam lingkungan yang aman, bermartabat, dan mendukung pertumbuhan karakter.

Pencegahan kekerasan berangkat dari pemahaman bahwa kekerasan bukanlah peristiwa yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya pembinaan nilai, ketidakmampuan mengelola emosi, serta lingkungan sosial yang tidak kondusif. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh dengan menyentuh aspek individu, lingkungan, dan sistem pendidikan itu sendiri.

Secara konseptual, pencegahan kekerasan memiliki sifat antisipatif dan edukatif. Antisipatif berarti tindakan dilakukan sebelum terjadi pelanggaran, sedangkan edukatif berarti pendekatan yang digunakan menekankan pada pembinaan, pemahaman, dan kesadaran, bukan semata-mata hukuman. Sekolah tidak hanya bertugas menindak perilaku

kekerasan, tetapi membangun kondisi yang membuat kekerasan tidak memiliki ruang untuk berkembang.

Pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan dapat dilakukan melalui pembentukan budaya sekolah yang positif. Budaya sekolah yang menjunjung tinggi nilai saling menghargai, empati, tanggung jawab, dan kedisiplinan akan membentuk pola interaksi yang sehat antar peserta didik. Ketika siswa terbiasa berada dalam lingkungan yang menghargai perbedaan dan menolak tindakan merendahkan, maka kecenderungan melakukan kekerasan akan berkurang secara alami.

Selain itu, pencegahan kekerasan juga berkaitan erat dengan pendidikan karakter. Melalui proses pembelajaran dan pembinaan, siswa diajarkan untuk mengenal nilai moral, memahami konsekuensi dari tindakan mereka, serta mengembangkan kemampuan mengendalikan diri. Pendidikan karakter berfungsi sebagai benteng internal yang membuat siswa mampu menolak perilaku agresif karena memiliki kesadaran etis, bukan karena takut terhadap sanksi.

Aspek penting lainnya dalam pencegahan kekerasan adalah penguatan hubungan sosial yang sehat antara warga sekolah. Hubungan yang terbuka antara guru dan siswa memungkinkan terjadinya komunikasi yang efektif sehingga masalah yang dialami siswa dapat diketahui lebih dini. Kedekatan ini menciptakan rasa aman dan kepercayaan, sehingga potensi konflik dapat diselesaikan melalui dialog dan bimbingan, bukan melalui tindakan kekerasan.

Pencegahan kekerasan juga memerlukan pengawasan dan pendampingan yang berkelanjutan. Kehadiran pendidik tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing yang memperhatikan perkembangan perilaku siswa, membantu mereka memahami aturan, serta memberikan arahan ketika muncul gejala perilaku menyimpang. Dengan pendampingan yang konsisten, sekolah dapat mendeteksi potensi masalah sejak tahap awal dan melakukan intervensi yang bersifat membina.

Lebih jauh lagi, pencegahan kekerasan harus dilihat sebagai tanggung jawab bersama seluruh warga sekolah, bukan hanya individu tertentu. Lingkungan yang aman tercipta melalui kerja sama antara pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan sistem sekolah yang mendukung terciptanya interaksi yang harmonis. Upaya ini membutuhkan konsistensi dalam penerapan nilai, keteladanan dalam perilaku, serta komitmen bersama untuk menolak segala bentuk kekerasan.

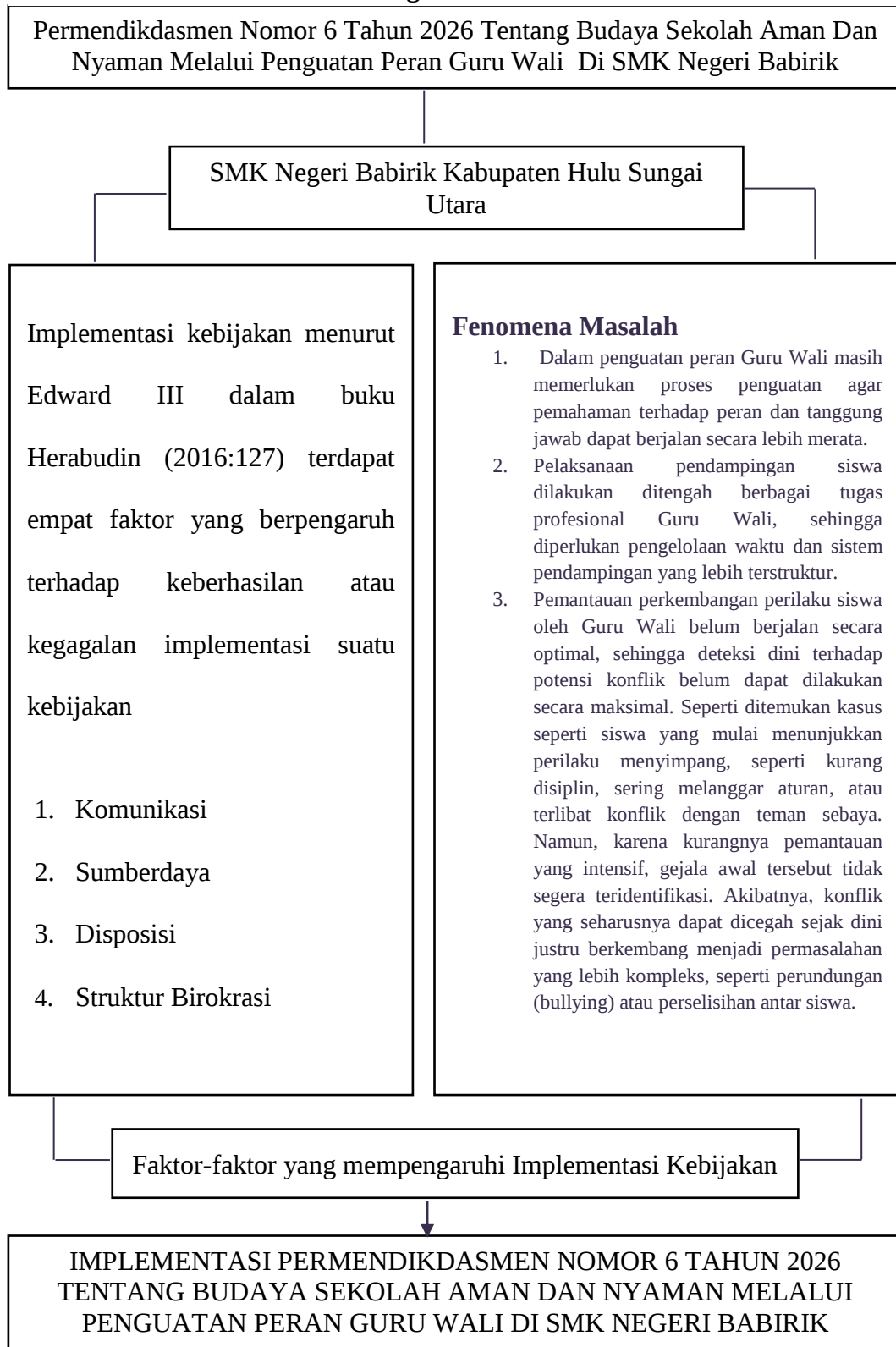
Dengan demikian, pencegahan kekerasan merupakan pendekatan komprehensif yang menempatkan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang berkarakter, mampu mengelola emosi, menghargai orang lain, dan menyelesaikan konflik secara damai. Pencegahan bukan hanya bertujuan menghilangkan kekerasan, tetapi membangun lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan peserta didik secara utuh, baik secara intelektual, sosial, maupun moral.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan proses memilih aspek-aspek dalam tinjauan teori yang berhubungan dengan masalah penelitian. Penelitian ini dilakukan pada SMK Negeri Babirik Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan tujuan untuk mengetahui implementasi permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 tentang penguatan peran guru wali dalam pencegahan kekerasan terhadap siswa di smk negeri babirik kabupaten hulu sungai utara. Pembahasan penelitian ini memfokuskan pada dalam pandangan Edward III dalam buku Herabudin (2016:127) ada empat faktor yang terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan.

Maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini pada SMK Negeri Babirik Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara yang beralamat Jl. Babirik-Negara KM I, Desa Babirik, Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana peneliti berupaya untuk mengamati, mengumpulkan dan menganalisa data. Maka yang menjadi alat instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, dengan judul penelitian “Implementasi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Penguatan Peran Guru Wali Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Siswa Di SMK Negeri Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara”.

C. Tipe Penelitian

Penelitian merupakan proses yang panjang. Penelitian berawal dari minat yang ada dalam diri seseorang dalam memaami fenomena tertentu yang kemudian berkembang menjadi ide, teori, dan konsep. Tipe penelitian berfungsi untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh objek penelitian dengan cara mendeskripsikan melalui pernyataan-pernyataan dengan menggunakan berbagai metode ilmiah.

Pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran, atau penjelasan tentang **"Implementasi Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Budaya Sekolah Aman Dan Nyaman Melalui Penguatan Peran Guru Wali Di SMK Negeri Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara"** secara sistematis dengan fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat dan data yang saling berhubungan, serta bukan hanya untuk mencari kebenaran mutlak tetapi pada hakikatnya mencari pemahaman observasi.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari informan secara langsung melalui wawancara yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti, dan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang diteliti untuk mempermudah dan memperoleh data yang diperlukan. Data yang diperoleh ini disebut data primer yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Yaitu Penelitian dengan pengumpulan data ini peneliti mempelajari buku-buku atau referensi, dokumen-dokumen maupun catatan-catatan tertulis yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh merupakan data sekunder dan digunakan sebagai pendukung dalam analisa data yaitu Dokumentasi, yakni teknik

memperoleh data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu hasil kajian sistematis, padu dan utuh. (Sandu Siyoto, 2015:67)

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data di dapat atau di peroleh, apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data di sebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

Dalam menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Informan yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

Tabel 3. 1
Informan Penelitian

No	Informan	Orang
1	Kepala Sekolah	1
2	Wali Kelas	5
3	Siswa/Siswi	4
Jumlah		10 Orang

Sumber : Dibuat oleh peneliti, 2026

E. Desain Operasional Penelitian

Desain operasional penelitian adalah sebagai alat bantu atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih memudahkan. Adapun yang menjadi indikator dari Implementasi Permandikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman Dan Nyaman Melalui Penguatan Peran Guru wali di SMK Negeri Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara model Edwards III dalam Herabudin (2016:127) implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor penting, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Untuk mempermudah dan memfokuskan masalah penelitian maka disusunlah desain operasional berdasarkan indikator variabel penelitian:

Tabel 3. 2

Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Implementasi Kebijakan menurut Edward III dalam buku Herabudin (2016:127)	1. Komunikasi	a. Sosialisasi kebijakan kepada guru wali dan warga sekolah b. Kejelasan informasi terkait peran guru wali dalam pencegahan kekerasan c. Konsistensi penyampaian aturan dan prosedur
	2. Sumber Daya	a. Ketersediaan guru wali sebagai pelaksana kebijakan b. Pemahaman dan kompetensi guru wali dalam menangani siswa c. Ketersediaan sarana pendukung (buku pedoman, administrasi, layanan konseling)
	3. Disposisi (Sikap Pelaksana)	a. Komitmen guru wali dalam menjalankan tugas pembinaan siswa b. Kepedulian terhadap pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah c. Tanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pendampingan siswa.
	4. Struktur Birokrasi	a. Adanya pembagian tugas dan fungsi

		guru wali yang jelas b. Tersedianya SOP atau aturan sekolah terkait pencegahan kekerasan c. Mekanisme koordinasi antara guru wali, BK, dan pihak sekolah
--	--	---

Sumber : Dibuat oleh peneliti, 2025

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data kualitatif dalam penelitian ini diantaranya:

1. Observasi

Menurut Bungin dalam (Sapto Haryoko, 2020: 152), “observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya, disamping indra lainnya seperti telinga, hidung mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya. Obsevasi adalah metode pengumpulan data oleh peneliti dengan menggunakan pengamatan secara langsung objek adau fenomena yang sedang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara menurut Moleong dalam (Sapto Haryoko, 2020: 165), “adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan suatu pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan tanya jawab dengan informan dimana tujuan dari wawancara ini adalah agar bisa mendapatkan informasi tentang sebuah topik tertentu..

3. Dokumentasi

Menurut Ridjal (Sapto Haryoko, 2020: 177), “yang dimaksud dokumen itu adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, yang menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa masa lalu tersebut. Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan informasi dari sebuah dokumen atau catatan yang sudah ada.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui tahap (Sugiyono, 2023:132-142) :

1. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, membuat abstraksi data aksi dari catatan lapangan, interview, transkrip, berbagai dokumen dan catatan lapangan. Dengan

menggunakan data kondensasi data akan menjadi lebih mantap/kuat. (Sugiyono:142).

2. Penyajian Data

Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami. (Sugiyono : 137).

3. Penarikan Kesimpulan

Teknik Penarikan kesimpulan pada penelitian kualitatif adalah adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Data display yang bila telah didukung oleh data-data yang mantap, maka dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel.(Sugiyono : 142).

H. Uji Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2023:186-193) antara lain:

1. Perpanjangan Pengamatan

Pada tahap awal peneliti memasuki lapangan, peneliti masih dianggap orang asing, masih dicurigai, sehingga informasi yang diberikan belum lengkap, tidak mendalam, dan mungkin masih banyak yang dirahasiakan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti

mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Bila data yang diperoleh selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.

Berapa lama perpanjangan pengamatan ini dilakukan, akan sangat tergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data. Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, berubah atau tidak. Bila setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar/dipercaya atau tidak.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke bawahan yang dipimpin, ke atasan yang menugasi, dan ke teman kerja yang merupakan kelompok kerjasama. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Dan triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

4. Analisis kasus negative

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

5. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif (kamera, handycam, alat rekam suara) sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

6. Mengadakan *Member check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga makin

kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsiran tidak di sepakati oleh pemberi data, maka peneliti harus melakukan diskusi dengan pemberi data.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. (2016). *Kebijakan publik*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Abidin, Zainal. (2019). *Implementasi kebijakan publik*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. (2017). *Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya. (2018). *Kebijakan publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dunn, William N. (2013). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hayat. (2018). *Kebijakan publik: Evaluasi, reformasi, dan formulasi*. Malang: Intrans Publishing.
- Herabudin. (2016). *Studi kebijakan pemerintah: Dari filosofi ke implementasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Igrisa, Irawaty. (2022). *Implementasi kebijakan publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Marwiyah, Siti. (2022). *Analisis kebijakan publik*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Ni'mah, Awwaliyatun. (2016). *Upaya sekolah dalam pencegahan tindakan kekerasan pada siswa SMP Negeri 1 Srandakan. (Skripsi)*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Novita, Dinda., & Sandra. (2025). *Implementasi program Sekolah Aman Anti Kekerasan di SMAN 1 Suliki. (Jurnal/Penelitian)*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Penguatan Peran Guru Wali.
- Usman, Nurdin. (2014). *Konteks implementasi berbasis kurikulum*. Jakarta: Grasindo.